



**TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN TANAMAN
RAKYAT DUSUN TAMPANING DESA PATAMPANUA KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG**

Andi Atira Ilfa¹⁾, Supratman²⁾, Mas'ud Junus²⁾, Andi Khairil A.Samsu³⁾

- 1) Mahasiswa, Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar
- 2) Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- 3) Fakultas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Universitas Muslim Maros
Email : athirailfa@gmail.com

Abstract

This study aims to assess the welfare indicators and to determine the welfare of community at community plantation forest areas. This study was conducted in December 2014 to January 2015, in community plantation forest areas Tampaning Hamlet, Patampanua Village, Marioriawa Subdistrict, Soppeng District. Data collected through observation, documentation and interview (questionnaire). Analysis method used is the analysis of revenue and analysis of cost to determine the amount of income of people in the use of forest products, and the qualitative descriptive analysis that explains the level of welfare were based on eight indicators from Central Agency of Statistics, which includes income, household consumption, state of residence, residence facility, the health of family members, accessibility to health, accessibility to education, and transport services.

The results showed that public's netto revenue by the use of non-timber forest products such as nuts, cocoa, sugar, honey, and livestock are Rp. 470.689.000/person/year and in average is 15.689.633/person/year. The level of welfare at income indicator are criteria of high, household consumption with criteria of moderate, state of residence in the form of semi-permanent categories, residential facilities with criteria of sufficient, the health of family members with criteria of sufficient, accessibility to health with category of easy, accessibility to education with category of sufficient, and transport services with category of sufficient. Based on the accumulation of eight indicators of welfare that have been previously studied, the welfare level of community in Tampaning Hamlet is in category of sufficient. The level of welfare in the area of community plantation forest (HTR) is increased if timber forest products can be managed immediately. Allowing timber logging in the area that have not been issued by the local government can help communities to solve the issues related to welfare.

Keywords: Welfare, Welfare Indicator, and Community Plantation Forest

PENDAHULUAN

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan sangat bergantung kepada hutan, begitu pula sebaliknya, hutan dapat tetap lestari bahkan rusak dengan adanya aktifitas masyarakat di dalamnya. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat lokal sekitar hutan belum juga sejahtera secara ekonomi maupun sosial, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah menetapkan peraturan atau kebijakan yang salah satunya tertera pada Undang-Undang No.41/2009 tentang Kehutanan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan hutan yang lestari di Indonesia.

Agenda Kementerian Kehutanan dan terkait dengan kebijakan revitalisasi sektor kehutanan adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan produksi, akses ke Lembaga Pembiayaan Pembangunan Hutan, dan akses ke pemasaran hasil hutan (industri perikanan). Dengan demikian, selain dapat diwujudkan agenda pengurangan kemiskinan, pada saat yang bersamaan juga akan terwujud peningkatan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional serta memenuhi permintaan bahan baku industri perikanan.

Untuk mencapai agenda tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mencanangkan program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Pembangunan HTR dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif, koordinatif dan kredibel akan membentuk struktur baru perekonomian

nasional berdaya saing tinggi yang berbasis sumber daya alam terbarukan, keunggulan lokal dan tahan terhadap perubahan eksternal, seperti krisis moneter/ekonomi.

Skema Hutan Tanaman Rakyat diharapkan mampu menunjang kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi maupun sosial, dimana masyarakat berperan aktif dalam mengelola hutan tanpa mengabaikan aspek ekologi. Berdasarkan hal itu, Pemerintah mencanangkan areal untuk pembangunan HTR, salah satunya di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan seluas \pm 3.736 ha. Hal tersebut tercantum dalam SK 272/MENHUT-VI/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Dusun Tampaning berada dalam kawasan wilayah Desa Patampanua, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, dengan luas wilayah 34 km². Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng mengenai pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yang ditetapkan pada tanggal 04 Maret 2013, memiliki luas lahan sebesar 596 ha, yang dibagi kepada dua Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu KTH Mantampawalie 1 dan KTH Mantampawalie 2.

Pengelolaan HTR di Dusun Tampaning belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari belum adanya izin penebangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Pengelolaan HTR di Dusun Tampaning pada saat ini hanya sebatas pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari dalam kawasan HTR, yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan hutan tanaman rakyat membutuhkan suatu perencanaan dalam pengelolaannya. Untuk membuat suatu perencanaan dibutuhkan informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pengelolaan, dalam hal ini tingkat kesejahteraan masyarakat pengelola hutan. Hal

tersebut dibutuhkan untuk menjadi bahan perbandingan dalam penilaian pembangunan HTR apabila telah berjalan nantinya.

Melalui hal tersebut maka peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai analisis tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan tanaman rakyat Dusun Tampaning, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan terdiri dari delapan indikator, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Penelitian ini akan menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam implementasi kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Soppeng.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015. Lokasi penelitian ini bertempat di Kawasan Hutan Tanaman Rakyat Dusun Tampaning, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik *Simple Random Sampling*, yaitu memilih individu sebagai anggota sampel berdasarkan kesempatan, dalam artian memiliki kesempatan yang sama, bukan karena adanya pertimbangan subyektif dari peneliti. Adapun jumlah responden pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Mantampawalie sebanyak 30 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- Wawancara, digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Metode pengumpulan data terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan wawancara tidak berstruktur
- Observasi lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada objek penelitian di lapangan.
- Studi literatur, yaitu pengumpulan data-data sekunder yang mendukung penelitian melalui pengutipan dan pencatatan data dari kantor desa sampai kabupaten, instansi yang terkait dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian.
- Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan dan pengambilan gambar di lapangan melalui pemotretan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara berstruktur dengan menggunakan kuesioner terhadap responden sebagai unit analisis. Data primer yang dikumpulkan adalah data atau informasi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan, komoditi yang diusahakan, bentuk pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, laporan penelitian, karya ilmiah, dokumentasi maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan berupa gambaran umum wilayah penelitian meliputi: keadaan fisik wilayah (letak dan luas), keadaan sosial, ekonomi

dan budaya (penduduk, kondisi masyarakat, mata pencaharian, pendidikan dan aksesibilitas), serta informasi atau data lainnya yang mendukung penelitian dan bahan pustaka yang menjadi landasan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indikator – Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Dusun Tampaning ditentukan dengan mengacu

pada 8 (delapan) indikator kesejahteraan sesuai yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yakni terdiri dari : (1) jumlah pendapatan per tahun, (2) jumlah pengeluaran/konsumsi per bulan, (3) kondisi tempat tinggal, (4) fasilitas tempat tinggal, (5) kesehatan anggota keluarga, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, (7) kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan (8) kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Hasil penelitian mengenai delapan indikator tersebut diatas, dikaji pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Responden berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera Menurut BPS

No.	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Skor	Jumlah Responden
1	Pendapatan	Tinggi	> Rp. 10.000.000	27
		Sedang	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	0
		Rendah	< Rp. 5.000.000	3
2	Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga	Tinggi	> Rp. 5.000.000	0
		Sedang	Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000	13
		Rendah	< Rp. 1.000.000	17
3	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen	19-21	0
		Semi Permanen	15-18	30
		Non Permanen	10-14	0
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap	16-20	1
		Cukup	11-15	28
		Kurang	5-10	1
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Bagus	< 25 %	5
		Cukup	25 % - 50 %	15
		Kurang	>50 %	10
6	Kemudahan Mendapatkan Layanan Kesehatan	Mudah	9-11	18
		Cukup	6-8	12
		Sulit	3-5	0
7	Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan	Mudah	12-15	0
		Cukup	8-11	15
		Sulit	4-7	15
8		Mudah	7-8	13

No.	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Skor	Jumlah Responden
	Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi	Cukup	5-6	17
		Sulit	3-4	0

1. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden, bentuk aktifitas yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah bertani dan berkebun. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memperoleh pendapatan melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diperoleh langsung dalam kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Dusun Tampaning. Jenis HHBK yang dimanfaatkan berupa kemiri, madu hutan, dan nira aren. Selain pemanfaatan HHBK, masyarakat juga memenuhi kebutuhannya dengan berkebun kakao/cokelat serta dari hasil berternak ayam.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Konsumsi Rumah Tangga Per Bulan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden, pengeluaran atau konsumsi rumah tangga di Dusun Tampaning tergolong dalam kategori sedang. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator dalam penilaian kesejahteraan masyarakat. Konsumsi rumah tangga berupa pangan dan pangan, yang termasuk dalam biaya perumahan, biaya kesehatan, pendidikan dan biaya anak, rekreasi, transportasi dan komunikasi.

Konsumsi rumah tangga per bulan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga. Komponen pengeluaran rumah tangga berupa pangan dan non pangan. Berdasarkan komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga,

dapat dihitung besarnya kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen. Semakin kecil kebutuhan rumah tangga, maka akan semakin besar peluang untuk menabung sisa hasil pendapatan yang diperoleh dari setiap tahunnya. Sebaliknya makin besar kebutuhan maka semakin besar resiko untuk menjadi miskin apabila pendapatannya tidak meningkat.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kondisi Tempat Tinggal.

Untuk mengetahui kondisi tempat tinggal masyarakat di Dusun Tampaning dalam hal ini yang dinilai berdasarkan bentuk bangunan rumah yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu rumah non permanen, seminpermanen, dan permanen. Dari data hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi tempat tinggal masyarakat di Dusun Tampaning memiliki bentuk semi permanen. Ciri-ciri semi permanen antara lain dapat diketahui dari luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, keadaan ruangan, dan status rumah.

Kondisi tempat tinggal masyarakat di Dusun Tampaning umumnya memiliki luas bangunan lebih dari 8 m persegi, berjenis lantai papan, jenis dinding dari papan, jenis atap seng/metal bergelombang, keadaan ruangan yang memiliki jendela, kamar tidur, ruang tamu, dapur dan WC, dan berstatus rumah pribadi. Pada umumnya rumah di Dusun Tampaning merupakan rumah panggung ciri-ciri yang telah dipenuhi tersebut digolongkan sebagai semi permanen.

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Fasilitas Tempat Tinggal.

Indikator yang dinilai dalam menentukan kriteria fasilitas tempat tinggal yaitu sumber air minum, sumber penerangan, kamar mandi/WC, bahan bakar yang digunakan, serapan air, dan pengelolaan sampah. Berdasarkan data hasil penelitian, sumber air minum yang digunakan masyarakat di Dusun Tampaning adalah dari sumber mata air terlindungi, sumber penerangan yang digunakan adalah listrik Non PLN atau dengan pemanfaatan panas sinar matahari dengan menggunakan panel surya (listrik tenaga surya). Panel surya ini cukup untuk memberikan penerangan di rumah-rumah warga. Kamar mandi yang digunakan sebagian besar masyarakat adalah kamar mandi pribadi dan sebagiannya lagi menumpang (bersama). Bahan bakar yang digunakan untuk memasak pada umumnya menggunakan dua alternatif, yaitu arang (kulit kemiri kering) dan gas elpiji. Serapan air di Dusun Tampaning mengandalkan tanaman yang ada disekitar rumah. Bentuk pengelolaan sampah masyarakat yaitu dibuang langsung, atau dengan dibakar hal ini terjadi karena minimnya tempat sampah dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan kurang, terbukti dengan cara pengelolaan sampah yang belum benar dengan membuang langsung ke alam.

5. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kondisi Kesehatan

Kualitas hidup masyarakat ditentukan dengan kondisi kesehatan keluarga. Kondisi kesehatan keluarga dilihat dari kemampuan keluarga menjaga kebersihan dan perilaku hidup sehat, serta bagaimana cara keluarga melakukan penanganan dini apabila ada anggota keluarga yang sakit.

Dari hasil penelitian menunjukkan ada 50% responden dari total 30 orang responden yang masuk dalam kategori kesehatan cukup. Dalam penelitian ini, responden memiliki keluhan kesehatan yang tergolong cukup ringan dan tidak menular, seperti sakit gigi, demam, flu, leher

tegang, pegal-pegal dan reumatik. Metode pengobatan yang dilakukan terhadap anggota keluarga yang sakit biasanya ditangani sendiri dengan membeli obat atau dengan meminta obat di puskesmas terdekat, jenis obat yang digunakan oleh masyarakat juga pada umumnya adalah obat-obat kimia, tetapi masih ada juga masyarakat yang menggunakan obat tradisional.

6. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pada umumnya masyarakat di Dusun Tampaning tergolong mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu sebanyak 18 responden atau 60% dari jumlah responden. Sementara responden yang tergolong dalam kategori cukup mudah mendapatkan pelayanan kesehatan ialah sebanyak 12 responden dan tidak ada responden yang sulit dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan sarana kesehatan, sumber daya manusia, dan jarak dari rumah. Sarana kesehatan yang berada di Dusun Tampaning cukup lengkap. Hal ini terbukti dengan adanya posyandu, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pustu (puskesmas pembantu), dan ketersediaan sumber daya manusia yaitu bidan kampung yang dapat memberikan pelayanan setiap kali dibutuhkan. Jarak sarana kesehatan dari rumah warga cukup dekat dan mudah dijangkau, karena berada di pinggir jalan utama desa.

7. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kemudahan Memasukkan Anak Ke Jenjang Pendidikan

Responden yang cukup mudah memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan umumnya menyekolahkan anak di tingkat Sekolah Dasar (SD). Sarana pendidikan yang ada di

Dusun Tampaning yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 64 Medde yang mudah dijangkau dengan jalan kaki. Selain sekolah dasar di Dusun Tampaning juga memiliki sarana pendidikan berupa TK/Play Grup.

Pendidikan formal anak pada keluarga di lingkungan masyarakat sekitar hutan sangat dipengaruhi berbagai faktor. Diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya tingkat pendidikan kepala keluarga, atau besarnya pendapatan keluarga. Sedangkan faktor eksternal berupa kemudahan dan ketersediaan sarana pendidikan sekolah dasar sampai pada sekolah menengah atas. Tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, hal ini dibantu dengan adanya program pemerintah wajib belajar sembilan tahun, dan berbagai program bantuan dana (beasiswa).

8. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, umumnya responden dalam mendapatkan

fasilitas transportasi dikategorikan cukup mudah, indikator yang digunakan dalam penilaian ini berupa kondisi jalan, alat transportasi, dan metode. Kondisi jalan di Dusun Tampaning umumnya tanah berbatu dan ada juga kondisi jalan berbatu tapi sebagian jalan beton. Alat transportasi yang ada di Dusun Tampaning berupa angkutan umum jenis *open cup*, alat transportasi ini hanya satu-satunya di Dusun Tampaning yang beroperasi dan tidak setiap hari, biasanya beroperasi setiap hari pasar. Metode yang dilakukan biasanya penumpang dijemput di rumah. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi ditandai dengan ketersediaan fasilitas transportasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memperlancar arus orang, barang dan jasa.

B. Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Dusun Tampaning, Desa Patampanua, berdasarkan 8 (delapan) indikator Badan Pusat Statistik (BPS) disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Keluarga Sejahtera berdasarkan Badan Pusat Statistik

No.	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Skor
1	Pendapatan	Tinggi (> Rp. 10.000.000)	3
2	Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga	Sedang (Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000)	2
3	Keadaan Tempat Tinggal	Semi Permanen (15-18)	2
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Cukup (11-15)	2
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Cukup (25 % - 50 %)	2
6	Kemudahan Mendapatkan Layanan Kesehatan	Mudah (9-11)	3
7	Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan	Cukup (8-11)	2
		Sulit (4-7)	1
8	Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi	Cukup (5-6)	2

Total	19
--------------	-----------

Kriteria untuk masing-masing klasifikasi sebagai berikut: Tingkat kesejahteraan tinggi (Skor 20-24)
Tingkat kesejahteraan sedang (Skor 14-19) Tingkat kesejahteraan rendah (Skor 8 – 13)

Pada Tabel 2 di atas, menunjukkan indikator kesejahteraan masyarakat di Dusun Tampaning, Desa Patampanua berada pada tingkat kesejahteraan sedang, dengan jumlah skor 19. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada kategori ini merupakan kesimpulan dari analisis indikator-indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat di Dusun Tampaning, tergolong pada kriteria sedang, hal ini menunjukkan adanya beberapa indikator dari penilaian yang telah dikaji harusnya ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat di Dusun Tampaning meningkat. Pemerintah wajib merealisasikan apa yang menjadi programnya demi memajukan suatu daerah, yakni dalam bidang pendidikan formal, akses masyarakat di bidang transportasi dalam hal ini perbaikan jalan dan penyediaan alat transportasi umum, fasilitas penerangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan menambahkan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam aspek pelayanan kesehatan.

Masyarakat yang bermukim di dalam kawasan HTR menggantungkan hidupnya dari dalam kawasan hutan dengan memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pendapatan masyarakat akan bertambah apabila hasil hutan berupa kayu dapat dimanfaatkan. Penghasilan yang didapatkan dari hal tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada berbagai indikator penilaian kesejahteraan, sehingga peran pembangunan HTR terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil kajian terhadap delapan indikator kesejahteraan masyarakat, ialah sebagai berikut : indikator pendapatan tergolong pada kriteria tinggi, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga pada kategori sedang, keadaan tempat tinggal masyarakat berada pada kategori bentuk semi permanen, fasilitas tempat tinggal berada pada kategori cukup. Adapun indikator kesehatan anggota keluarga berada pada kriteria cukup, kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan tergolong pada kategori mudah, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan tergolong cukup sulit, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi tergolong cukup.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Dusun Tampaning Desa Patampanua tergolong dalam kriteria sedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Penerbit Kansius. Yogyakarta.
- Anshar, Chairil. *Identifikasi Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru*. 2013. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Tidak Dipublikasikan.
- Boediono, 1982. *Ekonomi Mikro*. BPEE Yogyakarta, Yogyakarta.

- Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik Indonesia*. Kemiskinan Jakarta – Indonesia.
- Departemen Kehutanan. 1999. *Undang-Undang RI No.41, Tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Hakim, Ismatul. 2009. *Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat : Sebuah Terobosan Dalam Menata Kembali Konsep pengelolaan Hutan Lestari*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Ismail, Fakhri. 2013. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Medan Labuhan*. Universitas Sumatera Utara. Sumatera.
- Kartodihardjo, Haryadi, dkk. 2013. *Kembali Ke Jalan Lurus, Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Forci Development dan Tanah Air Beta. Yogyakarta.
- Masyud, 2007. *Departemen Kehutanan Berikan Akses Luas Kepada Masyarakat Untuk Usaha HTR*. Warta Tenure Edisi 4 Februari 2007, Jakarta.